

Memaksimalkan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Wisata Alam Surabaya Dan Kediri

Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tomy@untag-sby.ac.id

Abraham Ferry Rosando

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ferry@untag-sby.ac.id

Khoirul Anwar

Universitas Pawyatan Daha

khoirul.007007@gmail.com

Faradiba Najla Salsabila

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Erik Wahyudi

Universitas Pawyatan Daha

Frega Anggaraya Purba

fregapurba@gmail.com

Abstrak

Pariwisata menjadi sorotan penting di Indonesia apalagi desa menjadi bagian utama terkecil sebelum ke ranah pemerintahan selanjutnya. Negara menjadikan desa sebagai awal bagi masyarakat untuk memperkenalkan peta pemerintahan. Di desa berlangsung kegiatan perpolitikan, perekonomian, kebudayaan hingga entitas yang tidak bisa dinilai dalam perspektif ilmu hukum seperti hukum adat yang mewarisi nilai-nilai ajaran moral leluhur. Peranan penting ini harus tetap dijaga dimana harus ada kolaborasi antara universitas dengan desa. Tentu, peranan para pihak tidak sekadar di desa namun apapun yang bisa dijadikan pariwisata. Pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan agar terhindar dari stigma instan. Artinya ketika pariwisata sudah populer maka tingkat kepopulerannya harus dijaga agar tidak tersaingi dengan tempat lainnya atau bagaimana Sebagai dasar hukum pariwisata yaitu termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 10-2009) bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Kata kunci: Kediri; pariwisata; Surabaya

Pendahuluan

Pariwisata menjadi sorotan penting di Indonesia apalagi desa menjadi bagian utama terkecil sebelum ke ranah pemerintahan selanjutnya. Negara menjadikan desa sebagai awal bagi masyarakat untuk memperkenalkan peta pemerintahan. Di desa berlangsung kegiatan perpolitikan, perekonomian, kebudayaan hingga entitas yang tidak bisa dinilai dalam perspektif ilmu hukum seperti hukum adat yang mewarisi nilai-nilai ajaran moral leluhur. Peranan penting ini harus tetap dijaga dimana harus ada kolaborasi antara universitas dengan desa. Tentu, peranan para pihak tidak sekadar di desa namun apapun yang bisa dijadikan pariwisata.[1]

Pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan agar terhindar dari stigma instan.

Tomy Michael, Abraham Ferry Rosando, Khoirul Anwar, Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba

Artinya ketika pariwisata sudah populer maka tingkat kepopulerannya harus dijaga agar tidak tersaingi dengan tempat lainnya atau bagaimana. Sebagai dasar hukum pariwisata yaitu termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10-2009) bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata dalam perspektif yang lain merupakan sarana meningkatkan pemasukan bagi suatu tempat dan tolak ukur bagaimana masyarakat bisa memahami lingkungan sekitar. Penelitian berjudul Memaksimalkan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Wisata Alam Surabaya Dan Kediri.

Pariwisata merupakan kelangsungna yang dapat dilakukan oleh negara dalam mewujudkan hal baik bagi masyarakat. Hal baik yang dimaksud adalah bagaimana menjaga pariwisata tetap hidup dan bisa memiliki daya guna dengan masyarakat. Hal lainnya, pariwisata sebagai sarana dalam perolehan devisa. [2] Namun dalam konteks ini, devisa memang tidak bisa dipersamakan dengan devisa layaknyayang diterima negara karena penelitian ini akan mengkolaborasikan dengan pemaknaan devisa yang kecil. Makna kecil adalah pemasukan yang diperoleh oleh tempat wisata dan harus ada perluasan serta usaha kreatif dalam pengembangannya.

Pada masa kini, pariwisata memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Segala hal dapat dijadikan pariwisata dengan bersumber suatu tulisan dengan spot foto menarik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor adanya pengembangan kebijakan dari pemerintah bahwa dukungan dari masyarakat haruslah menjadi bagian utama yang didukung oleh pemerintah. [3]

Pengembangan kebijakan sebetulnya menjadi bagian penting dari negara hukum dimana kebijakan harus berasaskan Pancasila. Dimana asas Pancasila adalah menjadi kelima sila menjadi acuan yang baik. Kebijakan harus menunjukkan realita yang tampak sehingga apa yang dikehendaki UU No. 10-2009 akan tercipta dengan baik.

Ketika hal itu terjadi maka Pancasila dalam implementasinya harus nyata karena pemahaman tidak sekadar sila per sila namun keutuhan dan saling melengkapi adalah yang utama.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti mengambil satu rumusan masalah dalam wujud pernyataan yaitu bagaimana upaya memaksimalkan pariwisata berdasarkan UU No.

10-2009 di Wisata Alam Surabaya dan Kediri?

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan metode kuantitatif [4] untuk mengukur penerapan UU No. 10-2009 di Wisata Alama Surabaya dan Kediri. Populasi penelitian adalah Wisata Alam Surabaya dan Kediri, serta masyarakat Surabaya yang belum mengetahui korelasi UU No. 10-2009 dalam pariwisata. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada objek penelitian. Kuesioner yang diberikan mengandung pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman akan UU No. 10-2009 dengan penerapannya di Wisata Alam Surabaya dan Kediri.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam hal ini, wisata harus menunjukkan keberlanjutannya. Salah satu contohnya Kampung Nelayan Kalianak Surabaya Sebagai Jalur Menuju Wisata Hutan Mangrove Morokrengan dimana terdapat bagian dari objek wisata yang bisa dikembangkan. Sebelum menaiki perahu, para pengunjung bisa membeli bahan pancing hidup seperti udang hidup dan ini merupakan suatu komoditas. Hal lainnya menunjukkan bahwa pariwisata tidak sekadar penambahan spot foto melainkan harus ada keberlanjutan.

Misalnya adanya penyediaan akses publik yaitu fasilitas angkutan umum atau parkir kendaraan. Hal ini menjadi penting akrena bisa saja terdapat satu paket yang akan ada didalamnya. Selain itu, wisata yang diteliti berada di Goa Selomangleng Kediri, Taman Brantas Kediri, Simpang Lima Gumul Kediri, Makam Sunan Bungkul Surabaya, Museum Pendidikan Surabaya dan Taman Prestasi Surabaya. Artinya kepariwisataan juga memberikan feedback bagi masyarakat yang juga memberikan edukasi.

Fishing Village Mangrove Forest
Morokrembangan & Local Wisdom

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA | LPPM UNTAG SURABAYA | NCHU 國立中興大學

TOPIC ECOTOURISM

Tomy Michael, Frega Anggaraya Purba
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

A. Introduction
Morokrembangan is a place that has a side of Indonesian history. In 1960, the Republic of Indonesia Navy (ALRI) inaugurated the Morokrembangan Naval Air Base.[1] Over time, Morokrembangan has also changed sociologically, one of which is the Morokrembangan Fishermen's Village. Here there is a mangrove forest that passes through the Morokrembangan Fishing Village and is close to the International Container Terminal. Then this research complements the previous research conducted at the Dutch Peneleh Cemetery in Surabaya in 2019.[2]

B. Method
In this study, an interview was conducted directly with Erno Saputro (Mangrove Tourism Activist in Surabaya). This research was conducted on March 23, 2023 and used the legal hermeneutic method [3] See directly the things that are the problem and analyze according to the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism.[3]

C. Results
Results found

1. Morokrembangan Fisherman's Village as the entrance to mangrove tourism has an improper entry route. There is trash and signs and inadequate public facilities
2. There is a shift in work patterns from fishermen to oil sellers so that it will eliminate local wisdom such as earth alms
3. The mangrove forest that you can see after passing through the Morokrembangan Fishermen's Village is surrounded by plastic waste

D. Conclusion
There is a concrete suggestion that is

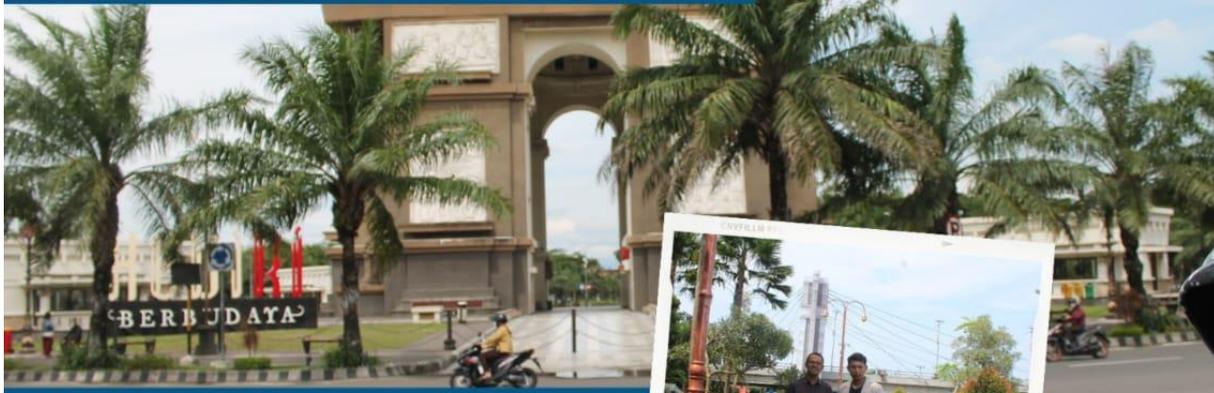
1. The participation of the Surabaya City Government in reviving local wisdom in the Morokrembangan Fisherman's Village
2. Digitalization efforts to attract tourists outside the city of Surabaya as well as training in human resources based on humanist tourism
3. The mangrove forest at the end of the Morokrembangan Fishermen's Village must be protected because there are flocks of birds moving there

E. References

[1] "BUNGA RAMPAI LAWATAN SEJARAH REGIONAL: MENELUSURI JEJAK SEJARAH MARITIM DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH".
[2] T. Michael, "TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2019, doi: 10.30996/dih.v15i2.2466.
[3] T. Michael, "PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL," HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4, no. 2, 2020, doi: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4046.



LPPM UNTAG
SURABAYA



Memaksimalkan pariwisata berdasarkan UU No. 10 TH 2009 tentang Kepariwisata Di Wisata Alam Surabaya dan Kediri



PENDAHULUAN

Konon, latar pembuatan monumen ini terinspirasi dari cita-cita Raja Jongko Joyoboyo, penguasa abad 12 yang ingin menyatukan lima wilayah di kabupaten Kediri. bertolak tak jauh dari monumen ini kita dapat menemukan beragam fasilitas macam gedung serba guna, gedung pemerintahan, bank daerah, terminal bus antar kota, Pasar Tugu, hingga wahana wisata macam Water Park Gumul dan Paradise Island. Simpang Lima gumul (SLG) masyarakat umum menyebutkan nya.

METODE PENELITIAN

Dengan mengunjungi dan mengamati objek yang terjadi.

PEMBAHASAN

Simpang lima gumul parisnya Indonesia. Bisa bila seperti itu karena monumen nya 85 % mirip yang di Paris. SLG ini tempat bersantai, bersuafoto masyarakat Kediri bahkan jawa timur pada siang sore atau malam. Tempatnya yang nyaman bersih dan cocok untuk berfoto dan menikmati indahnya Kediri. Fasilitas yang bagus dan terawat dan gratis yang membuat tempat ini menjadi banyak di kunjungi oleh masyarakat dan wisatawan.

KESIMPULAN

Saya salut dengan upaya untuk menarik pengunjung untuk datang. Dengan menyediakan tempat berfoto, tempat foto yang kekinian atau estetik. Ditemani teman dan pasangan untuk menikmati indahnya Kediri. Untuk kulineran sudah disediakan setan yang sangat berfarian tinggal pilih saja.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal.untag-sby.ac.id
www.Pemkabkediri.SLG.ic.id

Sub Anggota :

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., Khoirul Anwar, S.H., M.H.
Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba



MEMAKSIMALKAN PARIWISATA BERDASARKAN UU NO.10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DI WISATA ALAM SURABAYA DAN KEDIRI



Pendahuluan

Museum Pendidikan Surabaya merupakan salah satu museum di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. Museum ini diresmikan pada tahun 2019. Sebelum menjadi Museum Pendidikan Surabaya, museum ini sebelumnya merupakan sekolah. Sekolah itu bernama Sekolah Taman Siswa. Museum Pendidikan menyimpan bukti materiil Pendidikan pada masa Pra-Aksara, Masa Klasik, Masa Kolonial dan Masa Kemerdekaan. Museum ini berlokasi di Jalan Genteng Kali No 10 Surabaya

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi yang dituju serta mengamati lokasi wisata tersebut pada tanggal 13 Juli 2023 yang berlokasi di Genteng Kali No 10 Surabaya



Pembahasan

Museum Pendidikan Surabaya merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset dan rekreasi di Kota Surabaya. Diresmikan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada 25 November 2019. Fasilitas yang tersedia di Museum Pendidikan, antara lain : - Diorama Kelas - Parkir Area - Public Space (Taman) - Toilet - Ruang Laktasi - Musholla - AC. Museum ini cukup terawat dengan mempertahankan arsitektur lawas khas kolonial Belanda. Seringkali museum ini digunakan untuk masyarakat dari segala usia sebagai tempat foto yang estetik dan juga menyediakan berbagai macam barang nostalgia semasa sekolah.



Kesimpulan

Museum ini berada satu kompleks Taman Ekspresi, yang terletak di Jalan Genteng Kali Surabaya. Letaknya sangat strategis, di bagian paling utara Taman Ekspresi dan menghadap ke jalan besar. Tak jauh dari lokasi ini terdapat gedung kesenian Cak Durasim dan Mall Pelayanan Publik Siola. Pengunjung cukup memarkirkan kendaraan di tempat parkir Taman Ekspresi yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Daftar Pustaka

Jurnal.untag-sby.ac.id
<https://bappedalitbang.surabaya.go.id/ecobis/wisata/kategori-detail/162>

Sub anggota:

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., Khoirul Anwar, S.H., M.H.,
Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba

Kesimpulan

Pariwisata yang dijadikan objek penelitian masih membutuhkan penyesuaian

Tomy Michael, Abraham Ferry Rosando, Khoirul Anwar, Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba
pengolahan yang berkelanjutan mengacu pada UU No. 10-2009. Adanya penelitian ini akan menghasilkan perkembangan terbaru sehingga memunculkan peminatan masyarakat terhadap pariwisata alam.

Daftar Pustaka

- [1] T. Michael, "OPTIMALISASI PENGENALAN HIBAH PENDIDIKAN DAN DANA DESA PADA SEKOLAH DAN DESA CANDIPARI SIDOARJO," *Jubaedah : Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, <https://doi.org/10.46306/jub.v3i1.118>, vol. 3(1), pp. 58-63, 2023.
- [2] A. Kustanto, "PARIWISATA: SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMPEROLEH DEVISA," *JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM QISTIE*, 2019.
- [3] D. Hernawan and G. Pratidina, "MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR," *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 2015, doi: 10.30997/JSH.V6I2.504.
- [4] M. W. C. S and T. Michael, "KEDUDUKAN LEMBAGA SERTA TINDAK LANJUT MENGENAI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 2, pp. 1746-1764, Jan. 2023, doi: 10.53363/BUREAU.V3I2.278.